

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Ideologi feminis memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan di Perancis. Pemahaman feminis tentang kebebasan sesuai dengan semboyan Perancis untuk menerapkan demokrasi. Dunia mengakui bahwa negara yang berdemokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk memiliki hak yang sama dalam politik. Hal inilah yang didengungkan kaum feminis, kebebasan tanpa ada sekat bernama jenis kelamin.

Feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, sehingga harus ada upaya mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut. Gerakan feminisme muncul akibat adanya ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender, protes-protes melawan diskriminasi dan modernisasi yang sangat kuat. Ketiga hal tersebut menjadi penyebab munculnya ideologi feminisme yang kemudian memiliki perbedaan aliran pemikiran. Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis, dan Feminisme Liberal merupakan bentuk feminisme.

Ketiga aliran feminis berkembang pesat di Perancis. Negara yang bersemboyan *Liberte, Egalite Fraternete* atau berarti kebebasan, persamaan, persaudaraan ini lebih berideologi feminis Liberal. Sebelum parity diadopsi terlebih dahulu mereka menerapkan sistem kuota merupakan bukti feminisme Liberal diadopsi Perancis. Liberalnya sistem yang digunakan dalam meningkatkan representasi perempuan berubah kearah radikal, ketika kaum feminis Perancis

kuota bagi perempuan dalam parlemen. Feminis Liberal memfokuskan perjuangan pada cara mengeluarkan perempuan dari persoalan yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan politik. Perjuangan Liberal harus mengedepankan pendidikan untuk kaum perempuan, memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam politik, serta kedua jenis kelamin memiliki perlakuan yang sama diluar ruang privat.

Keterwakilan 50 persen berimbang antara laki-laki dan perempuan di Perancis dikenal dengan *Parity Law*. Desakan Parity oleh kaum feminis Perancis dikarenakan rendahnya representasi perempuan dalam politik. Mereka berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengamandemen undang-undang dan memasukkan Parity dalam Konstitusi. Advokasi yang dilakukan diawali dengan memusatkan gerakan pada partai Sosialis. Pejuang Parity menerapkan prinsipnya dalam anggaran dasar partai. Selain itu, mereka berusaha meningkatkan jumlah anggota perempuan dalam partai mereka dengan memberikan tekanan.

Advokasi tidak terbatas hanya dalam partai politik, akan tetapi mulai meluas. Para pejuang Parity melakukan publikasi melalui surat kabar dan media berita lainnya, sehingga konsep Parity dipahami oleh masyarakat di Perancis. Akibat publikasi yang dilakukan, memunculkan kepedulian yang tinggi terhadap Parity. Kepedulian inilah yang menyebabkan terbentuknya asosiasi Parity di Perancis. Asosiasi ini melakukan berbagai kegiatan yang mendukung Parity, seperti debat, konferensi, bahkan demonstrasi di depan National Assembly.

tanda tangan mendukung reformasi konstitusional, serta melayangkan dokumen yang berisi tuntutan:

1. Menyerukan tindakan sukarela partai politik untuk menerapkan hukum Parity.
2. Ekspansi dalam penggunaan Proporsional Representative. Parity yang digunakan dengan sistem ini terbukti mampu meningkatkan representasi perempuan dalam pemerintahan.
3. Pembiayaan publik bagi pihak yang menghormati Parity
4. Amandemen konstitusi untuk memperkenalkan *Affirmative Action*.

Tuntutan para pejuang Parity ini, pada akhirnya membuahkan hasil. Dengan dilakukannya amandemen konstitusi yang ditetapkan pada 28 Juni 1999, dan dipromosikan pada 6 Juni 2000. Hukum tersebut mencantumkan, bahwa semua pihak dalam hal ini adalah partai politik harus memastikan bahwa 50 persen dari kandidat mereka adalah perempuan, dan apabila jumlah ini tidak tercapai maka pihak terkait akan mendapatkan sanksi keuangan. Parity Law pertama kali diimplementasikan pada pemilu tahun 2002. Kenyataannya banyak partai politik yang tidak mencapai kandidat 50 persen, sehingga mereka mendapat sanksi keuangan. Representasi perempuan dalam parlemen Perancis meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, masih banyaknya partai politik yang melakukan pelanggaran merupakan masalah yang serius untuk disikapi oleh pemerintah. Partai politik akan menyepelekan undang-undang yang ada, karena sanksi yang diberikan sangat ringan. Membayar sanksi keuangan akan

kuota. Pada akhirnya akan menyebabkan berkurangnya perempuan dalam lembaga perwakilan, apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan kaum feminis.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah Perancis menghadapi masalah ini adalah, dengan mengawasi secara ketat jalannya Parity Law di Perancis. Menerapkan hukuman atau sanksi yang lebih tegas sampai kuota 50 persen perempuan dalam politik tercapai. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh partai politik menghadapi kasus ini, yakni dengan merekrut calon yang berkualitas, bukan suatu alasan bahwa perempuan itu tidak menguasai politik. Dilihat dari budaya yang berkembang di dunia begitu juga di Perancis, yang selama ini tidak memberikan kesempatan pada kaum perempuan. Sehingga, pembinaan dan pendidikan yang lebih sangat dibutuhkan untuk kaum perempuan